



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara  
Telepon/Faks. (0626) 20692 laman [www.samosirkab.go.id](http://www.samosirkab.go.id)

**NOMOR 19 TAHUN 2025**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

**SERI F NOMOR 1064**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR 19 TAHUN 2025**

**TENTANG**  
**PENETAPAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN**  
**HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK 128 DESA SE-KABUPATEN**  
**SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan besaran bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah untuk 128 desa se-Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang penetapan besaran bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah untuk 128 desa se-Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Seri D Nomor 27);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 Nomor 62 Seri F Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 Nomor 62 Seri F Nomor 1033);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK 128 DESA SE-KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2025

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
7. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta dan/atau Pemerintah yang bersumber dari APBD dan/atau APBDes serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

**BAB II**  
**RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN**  
**BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini menetapkan besaran bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah untuk 128 desa se-Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025.

### **Pasal 3**

- (1) Besaran bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah untuk setiap desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dihitung dengan ketentuan:
  - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari masing-masing desa sampai dengan bulan Nopember Tahun 2024.
- (2) Sumber data dalam penghitungan pengalokasian besaran bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
- (3) Rincian bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III MEKANISME PENYALURAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 4**

- (1) Penyaluran bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah setiap desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
  - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah setiap desa paling cepat bulan Juli.
- (3) Penyaluran bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati Samosir menerima Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati Samosir menerima laporan realisasi penyerapan alokasi dana desa, bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah Tahun Anggaran sebelumnya dan laporan realisasi tahap I tahun berjalan dari kepala desa.
- (5) Bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah yang diterima desa tahun anggaran 2025 dianggarkan dalam APBDes.

**BAB IV**  
**PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN BAGIAN HASIL**  
**PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 5**

- (1) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, Pemerintah Desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dikelola menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
- (2) Penggunaan bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengelolaan bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah dikelola sesuai dengan ketentuan dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

**Pasal 6**

Kepala Urusan Keuangan Desa sebagai wajib pungut pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang sah, wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang sah ke rekening kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi, bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah setiap tahapan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat penyaluran bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah setiap tahap dari RKUD ke RKD.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda penyaluran bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah.
- (4) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Pasal 8**

Penetapan besaran bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah untuk 128 desa di Kabupaten Samosir tahun anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 8 Mei 2025

**BUPATI SAMOSIR,**  
Cap/dto  
**VANDIKO T. GULTOM**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir  
Nomor 14 Tahun 2025  
Seri F Nomor 1064  
Tanggal 8 Mei 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir

  
MARUDUT TUA SITINJAK

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 19 TAHUN 2025

TANGGAL : 8 MEI 2025

TENTANG : PENETAPAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH  
DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK 128 DESA  
SE-KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2025

**RINCIAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH  
UNTUK 128 DESA SE-KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	KECAMATAN/DESA	BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (BHPD)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (BHRD)	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
<b>SIMANINDO</b>				
1	AMBARITA	30.206.950	11.730.210	41.937.160
2	CINTA DAME	46.905.380	8.273.820	55.179.200
3	DOSROHA	38.592.690	8.273.820	46.866.510
4	GAROGA	34.145.920	8.273.820	42.419.740
5	HUTA GINJANG	25.107.660	8.273.820	33.381.480
6	MADUMA	24.897.330	8.273.820	33.171.150
7	MARTOBA	32.480.400	8.273.820	40.754.220
8	PARBALOHAN	24.958.360	8.273.820	33.232.180
9	PARDOMUAN	25.380.780	8.273.820	33.654.600
10	PARMONANGAN	25.836.980	8.273.820	34.110.800
11	SIMANINDO SANGKAL	29.261.560	8.273.820	37.535.380
12	SIHUSAPI	25.035.320	8.273.820	33.309.140
13	SIMARMATA	50.808.700	8.273.820	59.082.520
14	TANJUNGAN	25.602.180	11.780.610	37.382.790
15	TOMOK	61.174.520	35.523.700	96.698.220
16	UNJUR	48.181.580	8.273.820	56.455.400
17	SIALLAGAN PINDARAYA	35.988.850	12.067.170	48.056.020
18	MARLUMBA	30.279.780	8.273.820	38.553.600
19	SIMANINDO	30.084.060	11.636.490	41.720.550
20	TOMOK PARSAORAN	31.185.060	8.273.820	39.458.880
<b>JUMLAH</b>		676.114.060	206.845.480	882.959.540
<b>PANGURURAN</b>				
1	AEK NAULI	25.611.670	7.682.830	33.294.500
2	HUTA BOLON	28.819.580	11.524.980	40.344.560
3	HUTA TINGGI	25.876.660	9.697.180	35.573.840
4	HUTA NAMORA	33.396.630	7.682.830	41.079.460
5	LUMBAN PINGGOL	32.694.870	7.682.830	40.377.700
6	LUMBAN SUHI-SUHI DOLOK	25.814.690	7.682.830	33.497.520
7	LUMBAN SUHI-SUHI TORUAN	26.849.040	7.682.830	34.531.870
8	PANAMPANGAN	27.235.400	7.682.830	34.918.230
9	PARBABA DOLOK	29.111.360	7.682.830	36.794.190
10	PARDOMUAN I	64.048.170	64.280.550	128.328.720
11	PARDOMUAN NAULI	25.997.190	7.682.830	33.680.020
12	PARDUGUL	28.804.350	7.682.830	36.487.180
13	PARHORASAN	25.428.340	7.682.830	33.111.170
14	PARLONDUT	26.345.490	7.682.830	34.028.320
15	PARMONANGAN	25.543.740	7.682.830	33.226.570
16	PARSAORAN I	34.728.680	9.652.790	44.381.470
17	RIANIATE	26.192.150	7.682.830	33.874.980
18	SAIT NIHUTA	26.454.950	7.682.830	34.137.780
19	SIALANGUAN	27.321.680	7.682.830	35.004.510
20	SIANTING-ANTING	29.146.590	7.682.830	36.829.420
21	SINABULAN	25.410.320	7.682.830	33.093.150
22	SIOPAT SOSOR	138.688.020	7.682.830	146.370.850
23	SITOLU HUTA	25.865.380	7.682.830	33.548.210
24	SITUNGKIR	26.757.550	7.774.750	34.532.300
25	TANJUNG BUNGA	33.000.050	9.652.790	42.652.840
<b>JUMLAH</b>		<b>845.142.550</b>	<b>258.556.810</b>	<b>1.103.699.360</b>

NO	KECAMATAN/DESA	BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (BHPD)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (BHRD)	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
<b>HARIAN</b>				
1	DOLOK RAJA	26.889.620	7.325.770	34.215.390
2	HARIARA POHAN	36.343.980	7.325.770	43.669.750
3	JANJI MARTAHAN	61.858.400	11.175.380	73.033.780
4	PARTUNGKOT NAGINJANG	40.747.920	10.507.750	51.255.670
5	SAMPUR TOBA	27.131.670	7.325.770	34.457.440
6	SIPARMAHAN	25.066.250	8.517.890	33.584.140
7	SOSOR DOLOK	25.116.120	33.169.170	58.285.290
8	TURPUK LIMBONG	27.011.430	8.517.890	35.529.320
9	TURPUK MALAU	26.897.120	8.517.890	35.415.010
10	TURPUK SAGALA	26.878.920	8.896.780	35.775.700
11	TURPUK SIHOTANG	63.687.390	8.517.890	72.205.280
12	HARIARA PINTU	25.680.170	7.325.770	33.005.940
13	HUTAGALUNG	26.165.150	7.325.770	33.490.920
<b>JUMLAH</b>		<b>439.474.140</b>	<b>134.449.490</b>	<b>573.923.630</b>
<b>SIANJUR MULA MULA</b>				
1	AEK SIPITU DAI	49.461.420	9.275.590	58.737.010
2	BOHO	35.618.760	7.942.860	43.561.620
3	BONAN DOLOK	29.759.220	7.942.860	37.702.080
4	GINOLAT	33.102.110	7.942.860	41.044.970
5	HASINGGAAN	31.763.650	7.942.860	39.706.510
6	HUTA GINJANG	31.962.140	7.942.860	39.905.000
7	HUTA GUR-GUR	32.823.700	7.942.860	40.766.560
8	SARI MARRIHIT	31.095.710	33.417.310	64.513.020
9	SIANJUR MULA-MULA	33.434.170	9.928.580	43.362.750
10	SIBORO	33.675.400	7.942.860	41.618.260
11	SINGKAM	31.847.350	7.942.860	39.790.210
12	HABEAHAN NABURAHAN	31.124.800	7.942.860	39.067.660
<b>JUMLAH</b>		<b>405.668.430</b>	<b>124.107.220</b>	<b>529.775.650</b>
<b>ONAN RUNGGU</b>				
1	HARIAN	28.609.590	8.273.820	36.883.410
2	HUTA HOTANG	38.889.870	8.273.820	47.163.690
3	JANJI MATOGU	25.167.190	8.273.820	33.441.010
4	ONAN RUNGGU	45.041.180	13.754.780	58.795.960
5	PAKPAHAN	33.286.100	8.273.820	41.559.920
6	PARDOMUAN	34.528.490	8.273.820	42.802.310
7	RINABOLAK	25.627.870	8.273.820	33.901.690
8	SILIMA LOMBU	49.453.640	8.273.820	57.727.460
9	SIPIRA	31.773.530	8.273.820	40.047.350
10	SITAMIANG	27.421.310	27.614.310	55.035.620
11	SITINJAK	38.508.020	8.273.820	46.781.840
12	TAMBUN SUNGKEAN	27.361.660	8.273.820	35.635.480
<b>JUMLAH</b>		<b>405.668.450</b>	<b>124.107.290</b>	<b>529.775.740</b>

NO	KECAMATAN/DESA	BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (BHPD)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (BHRD)	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
<b>NAINGGOLAN</b>				
1	HUTA RIHIT	26.278.470	10.342.270	36.620.740
2	NAINGGOLAN	55.700.290	10.342.270	66.042.560
3	PANANGGANGAN	30.181.170	10.342.270	40.523.440
4	PANGALOAN	33.048.640	10.342.270	43.390.910
5	PASARAN I	25.282.260	10.342.270	35.624.530
6	PASARAN PARSAORAN	27.390.260	10.342.270	37.732.530
7	SIBONOR OMPU RATUS	48.621.870	10.342.270	58.964.140
8	SINAGA URUK PANDIANGAN	36.357.320	10.342.270	46.699.590
9	SIPINGGAN LUMBAN SIANTAR	25.192.040	10.342.270	35.534.310
10	TOGUAN GALUNG	32.410.580	10.342.270	42.752.850
11	JANJIMARAPOT	24.228.390	10.342.270	34.570.660
12	PANANGGANGAN II	32.497.270	10.342.270	42.839.540
13	SIPINGGAN	42.285.570	10.342.270	52.627.840
<b>JUMLAH</b>		439.474.130	134.449.510	573.923.640
<b>PALIPI</b>				
1	GORAT PARLOMBUAN	32.468.840	10.342.270	42.811.110
2	HATOGUAN	30.906.520	10.342.270	41.248.790
3	HUTA GINJANG	26.582.320	10.342.270	36.924.590
4	PALIPI	57.457.610	10.342.270	67.799.880
5	PARDOMUAN NAULI	24.859.980	10.342.270	35.202.250
6	PARSAORAN URAT	30.850.950	10.342.270	41.193.220
7	SAOR NAULI HATOGUAN	31.301.740	10.342.270	41.644.010
8	SIGAOL MARBUN	37.327.510	10.342.270	47.669.780
9	SIGAOL SIMBOLON	33.548.000	10.342.270	43.890.270
10	SIMBOLON PURBA	37.024.250	10.342.270	47.366.520
11	SUHUT NIHUTA PARDOMUAN	28.812.740	10.342.270	39.155.010
12	URAT II	36.923.830	10.342.270	47.266.100
13	URAT TIMUR	26.416.610	10.342.270	36.758.880
14	PARLOMBUAN	55.459.570	10.342.270	65.801.840
15	HUTA DAME	28.468.710	10.342.270	38.810.980
16	SIDEAK	31.076.020	10.342.270	41.418.290
17	PAMUTARAN	25.211.750	10.342.270	35.554.020
<b>JUMLAH</b>		<b>574.696.950</b>	<b>175.818.590</b>	<b>750.515.540</b>
<b>RONGGUR NIHUTA</b>				
1	LINTONG NIHUTA	28.179.260	10.342.270	38.521.530
2	PARADUAN	51.165.520	10.342.270	61.507.790
3	RONGGUR NIHUTA	47.109.770	10.342.270	57.452.040
4	SABUNGAN NIHUTA	26.418.180	10.342.270	36.760.450
5	SALAON DOLOK	30.700.010	10.342.270	41.042.280
6	SALAON TOBA	32.119.900	10.342.270	42.462.170
7	SALAON TONGA-TONGA	25.251.730	10.342.270	35.594.000
8	SIJAMBUR	29.501.240	10.342.270	39.843.510
<b>JUMLAH</b>		<b>270.445.610</b>	<b>82.738.160</b>	<b>353.183.770</b>

NO	KECAMATAN/DESA	BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (BHPD)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (BHRD)	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
<b>SITIOTIO</b>				
1	BUNTU MAULI	32.446.170	10.342.270	42.788.440
2	CINTA MAJU	32.516.340	10.342.270	42.858.610
3	HOLBUNG	31.025.160	10.342.270	41.367.430
4	JANJI RAJA	31.687.250	10.342.270	42.029.520
5	SABULAN	48.092.250	10.342.270	58.434.520
6	TAMBA DOLOK	35.651.750	10.342.270	45.994.020
7	PARSAORAN	27.485.060	10.342.270	37.827.330
8	JANJI MARIA	31.541.630	10.342.270	41.883.900
<b>JUMLAH</b>		<b>270.445.610</b>	<b>82.738.160</b>	<b>353.183.770</b>

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 8 Mei 2025

**BUPATI SAMOSIR,**

**Cap/dto**

**VANDIKO T. GULTOM**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir  
Nomor 19 Tahun 2025  
Seri F Nomor 1064  
Tanggal 8 Mei 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir

  
MARUDUT TUA SITINJAK